

ANALISIS PENERAPAN SAK EMKM PADA UMKM SEKTOR PANGAN DI KECAMATAN MUARO BULIAN KABUPATEN BATANGHARI

(Studi Pada Rumah Makan Putri Solo)

Chayrani Pebdayanti

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: chayranipebdyanti@gmail.com

Dr. Putri Apria Ningsih, S.E.I., M.A

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: putriapria8@gmail.com

Muthmainnah, S.E., M.S.Ak

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Email: muthmainnah@uinjambi.ac.id

Korespondensi penulis: chayranipebdyanti@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to find out what records are carried out by Micro, Small and Medium Enterprises in preparing their financial reports and to find out the preparation of financial reports using SAK EMKM for Micro, Small and Medium Enterprises. The method used is a qualitative descriptive method. The results of this research are that MSMEs at Putri Solo Restaurant do not keep records or bookkeeping regarding the entry and exit of financial reports and MSMEs at Putri Solo Restaurant do not record their financial reports in accordance with financial accounting standards for micro, small and medium entities (SAK EMKM). They only rely on memory to measure the amount of expenditure on production activities and these MSMEs also believe that their business does not need to record financial reports according to applicable standards.*

Keywords: financial accounting, SAK EMKM.

Abstract: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pencatatan apa saja yang dilakukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam menyusun laporan keuangannya dan untuk mengetahui penyusunan laporan keuangan dengan SAK EMKM pada Usaha Mikro Kecil dan menengah. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini UMKM pada Rumah Makan Putri Solo tidak melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai keluar masuknya laporan keuangan dan UMKM Pada Rumah Makan Putri Solo tidak melakukan pencatatan laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM). Mereka hanya mengandalkan ingatan untuk mengukur jumlah pengeluaran kegiatan produksi dan UMKM tersebut juga berkeyakinan bahwa usahanya belum perlu mencatat laporan keuangan sesuai standar yang berlaku.

Kata kunci : akuntansi keuangan, SAK EMKM.

LATAR BELAKANG

Di Indonesia, definisi UMKM diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 tentang UMKM. Pasal 1 dari UU tersebut, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan badan usaha perorangan yang memiliki kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian, baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Sedangkan usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung, dari usaha mikro, usaha kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam UU tersebut.

Salah satu Standar Pelaporan Keuangan adalah Standar Pelaporan Keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM). Dalam ruang lingkup SAK EMKM, dijelaskan bahwa standar ini berlaku untuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang tidak menerbitkan laporan keuangan bertujuan umum untuk pengguna eksternal dan tidak memiliki pelaporan publik yang signifikan.

Sebagai penyusun standar akuntansi keuangan Indonesia yang diakui, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) mengakui pentingnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memajukan perekonomian negara. Pada tahun 2009 DSAK IAI memberikan Prinsip Pembukuan Moneter Untuk Zat Tanpa Tanggung Jawab Umum (SAK ETAP) sebagai salah satu bentuk bantuan untuk memberdayakan perputaran dan perkembangan UMKM di Indonesia. Karena itu, ada persyaratan untuk aksesibilitas pedoman pembukuan yang lebih mudah daripada SAK berbasis IFRS dan SAK ETAP umum karena SDM yang terbatas dalam menyampaikan laporan keuangan menggunakan dua titik dukungan ini. DSAK IAI mengembangkan standar akuntansi yang dapat memenuhi kebutuhan UMKM dengan membentuk kelompok kerja bersama asosiasi industri, regulator, dan pihak lain yang berkepentingan untuk mempresentasikan SAK yang dapat mendukung kemajuan UMKM di Indonesia. Dalam upaya mendorong perekonomian Indonesia ke depan, DSAK IAI mengesahkan SAK EMKM pada tahun 2016.

Ikatan Akuntansi Indonesia (2016), menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan untuk EMKM yaitu, SAK EMKM (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah), standar ini terdiri dari tiga komponen yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Standar ini memudahkan entitas untuk menyusun laporan keuangan. Laporan Keuangan tidak hanya bertujuan untuk memberikan informasi terkait dengan pemasukan dan pengeluaran keuangan saja, tetapi laporan keuangan juga bertujuan untuk mengetahui kinerja perusahaan selama tahun berjalan dan sebagai bahan evaluasi perusahaan jika mengalami kerugian. Laporan keuangan yang baik adalah laporan keuangan yang sesuai dengan standar yang digunakan.

Tabel 1,1
Data kementerian koperasi dan UKM RI
Secara jumlah unit pangsa pada tahun 2017

Jenis Usaha	Total Jumlah Unit	Pangsa
Usaha Besar	5400 Unit	0,01%
Usaha Mikro	107,2 Unit	89,2%
Usaha Kecil	7 Unit	4,74%
Usaha Menengah	3,73 Unit	3,11%

Pada Table 1.1 diatas Kementerian Koperasi dan UKM RI melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62.9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017), sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5400 unit. Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), Usaha Kecil 7 juta (4,74%), dan Usaha Menengah 3,73 juta (3,11%), Sementara Usaha Besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa. Artinya secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, sementara Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3% dari tenaga kerja nasional. UMKM merupakan usaha yang dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional namun dikelola oleh pengusaha kecil dengan modal yang relatif kecil.

Aset besar para eksekutif merupakan kunci vital yang menyebabkan tercapai atau tidaknya sebuah UMKM. Untuk membantu UMKM menyusun kebutuhan perincian keuangannya, Ikatan Afiliasi Pembukuan Indonesia (IAI) pada tahun 2016 memberikan norma pembukuan keuangan miniatur, kecil dan menengah (SAK EMKM) untuk membangun kemudahan dan tanggung jawab pelaporan keuangan unsur. sekaligus mendukung ekspansi UMKM Indonesia yang sedang berkembang. Hasilnya, UMKM dapat memperoleh informasi mengenai posisi keuangan perusahaan, perubahan modal pemilik usaha, serta arus kas masuk dan keluar yang sangat penting bagi kelangsungan usaha.

Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia (No. 20 Tahun 2008 pada Bagian 1 pasal 1) Dimaknai bahwa: Usaha perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan usaha menengah atau badan usaha yang bukan milik usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi pengertian usaha kecil dianggap usaha kecil Usaha menengah adalah perseorangan atau badan hukum yang bukan merupakan bagian dari usaha kecil atau bisnis besar Sebaliknya, bisnis dengan total kekayaan bersih atau penjualan tahunan lebih dari bisnis menengah dianggap sebagai bisnis besar.

Ada banyak masalah yang dihadapi usaha kecil dan menengah. Masalah yang dihadapi UMKM secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori: kurangnya manajer bisnis yang berkualitas, terutama sebagai akibat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia, dan kurangnya akses ke sumber daya manufaktur untuk UMKM. Sebagian besar kendala yang dihadapi UMKM terutama terkait dengan keterampilan inovasi, implementasi, metode penciptaan, organisasi, peningkatan produk, metode akuntansi dan pemasaran. Diharapkan para pelaku usaha mampu mengatasi tantangan akuntansi dengan bantuan SAK EMKM. SAK EMKM menawarkan skema akuntansi yang lebih sederhana yang mencakup transaksi khas EMKM dan dasar penilaian hanya berdasarkan biaya historis.

**ANALISIS PENERAPAN SAK EMKM PADA UMKM SEKTOR PANGAN DI
KECAMATAN MUARO BULIAN KABUPATEN BATANGHARI (Studi Pada Rumah
Makan Putri Solo)**

Tabel 1.2
Data UMKM Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi (Data Usaha Menengah)

No	Kabupaten/ Kota	Usaha Menengah Tahun 2017-2022					
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
1.	Merangin	9	43	13	13	13	13
2.	Kota Jambi	-	-	-	-	-	-
3.	Sarolangun	6	35	35	35	10	10
4.	Kota Sungai Penuh	154	187	184	184	1,076	1,699
5.	Kerinci	-	-	-	125	125	125
6.	Batanghari	3	43	45	17	25	10
7.	Muaro Bungo	380	380	380	380	290	290
8.	Tanjung Jabung Barat	-	-	-	-	-	-
9.	Tebo	-	-	-	233	-	-
10.	Muaro Jambi	-	1	1	1	1	-
11.	Tanjung Jabung Timur	-	249	249	249	253	-

*Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Rekapitulasi data UMKM Kabupaten Kota Seprovinsi Jambi Tahun 2017-2022*

Di Kabupaten Batanghari tercatat data rekapitulasi UMKM seperti yang terlihat pada Tabel 1.2 dibidang Usaha Menengah mengalami Fluktuasi yang mana data 5 tahun terakhir dari tahun 2017-2022. Pada tahun 2017 tercatat 3 unit usaha, pada tahun 2018 mengalami kenaikan tercatat 43 unit usaha, pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebanyak 45 unit usaha, pada tahun 2020 mengalami penurunan sebanyak 17 unit usaha, pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebanyak 25 unit usaha, dan pada tahun 2022 mengalami penurunan 10 unit usaha dibidang Usaha Menengah. Dengan begitu pentingnya bagi pelaku UMKM untuk memahami dan menerapkan SAK EMKM terhadap usaha yang dikelola agar menunjang usahanya. Berikut data UMKM yang ada di Kecamatan Muaro Bulian Kabupaten Batanghari.

Tabel 1.3
Rekapitulasi Data UMKM Berdasarkan Jenis Usaha di Muaro Bulian Kabupaten Batanghari

Jenis Usaha	Jumlah
Pangan	2448
Jasa	786
Fashion	263
Peternakan	249
Perkebunan	97
Pertanian	74
Industri Makanan	377
Industri Kerajinan	121

Online Shop	141
Dagang	451
Total Usaha	5007

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batanghari (2022)

Di Kecamatan Muaro Bulian Kabupaten Batanghari tercatat ada 110 desa, dan ada banyak sekali jenis usaha yang dikelola oleh wirausaha seperti yang terlihat pada Tabel 1.3. Jenis usaha yang paling banyak yaitu bagian pangan sebanyak 2448 usaha dari total keseluruhan 5007 usaha yang terdata di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batanghari(2022).

Penelitian Ini telah dilakukan oleh Rizki Asrinda Handayani berdasarkan hasil penelitian dengan hasil wawancara yang dilakukan kepada pemilik UMKM farhan cake's yang menyusun laporan keuangan yang hanya berisikan catatan pendapatan dan pengeluaran berdasarkan hasil kegiatannya. Laporan akuntansi UMKM farhan Cake's belum memuat pembagian pendapatan dan beban dalam Laporan Akuntansi, sedangkan dalam SAK EMKM menjelaskan bahwa terdapat tiga komponen yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan dalam laporan posisi keuangan adanya pemisahan antara aset lancar dan aset tetap, liabilitas dan ekuitas sedangkan laporan laba rugi adanya pemisahan pendapatan, beban, dan pajak penghasilan. Dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi bahwa pencatatan yang dilakukan pada UMKM Farhan Cake's sangat sederhana dimana pencatatan penyusunan laporan pembukuan masih belum sesuai dengan ilmu akuntansi, karena pencatatan yang dilakukan tidak menunjukkan tahap-tahap seperti yang ada pada siklus akuntansi dan pencatatan hanya dapat dipahami oleh pemilik itu sendiri.

Namun hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan Muhammad Ivan Nurfadillah yang memimpin penelitian tentang pemahaman dan penerapan SAK ETAP pada industri keripik tempe di Ngawi. Hasil temuan menunjukkan bahwa delapan dari sembilan manajer di industri keripik tempe telah memahami SAK ETAP. Dalam menjalankan usahanya, para pemimpin industry dalam negeri tidak memperhatikan kriteria pengakuan aset, kewajiban, modal, pendapatan, dan biaya. Terdapat 6 usaha rumahan keripik tempe yang telah membuat laporan keuangan. Saat pelaporan belum ada pihak yang melakukan pelatihan ataupun registrasi terkait dengan SAK ETAP, sehingga keuangan masih sebatas laporan laba rugi.

Dari beberapa penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa adanya keterbatasan pengetahuan dari pemilik usaha mengenai akuntansi yang menjadi kendala dalam pencatatan akuntansi dan kurangnya pengetahuan pemilik UMKM tentang akuntansi dalam menyediakan laporan keuangan pada UMKM dan UMKM tersebut juga berkeyakinan bahwa usahanya belum perlu mencatat laporan keuangan sesuai standar. Minimnya pengetahuan pemilik tentang pencatatan laporan keuangan maka hanya dapat melakukan pencatatan secara sederhana karena dirasakan sangat sulit dan juga tidak memahami dan mengerti cara pencatatan laporan keuangan.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Entitas

Tata kelola dan akuntabilitas bisnis merupakan inti dari teori entitas. Menurut Suwardjono teori entitas ini, adalah komponen pemilik yang berbeda. Hal ini didasarkan

pada anggapan bahwa pemilik akan tetap menguasai dan bertanggung jawab atas semua kegiatan ekonomi yang berlangsung dalam usaha tersebut, namun akan diperhitungkan secara terpisah dari kegiatan pemilik. Untuk memenuhi persyaratan hukum dan menjaga hubungan baik dengan pihak ketiga, tanggung jawab ini memerlukan ketersediaan informasi keuangan tentang perusahaan. Pentingnya menjaga keuangan perusahaan terpisah dari keuangan pribadi pemilik karena pentingnya tanggung jawab ini. Dengan Mengingat hal ini, dikatakan bahwa tujuan teori entitas adalah untuk memberikan akuntabilitas dan pencatatan dalam memisahkan keuangan pribadi pemilik dari keuangan operasional perusahaan.

Bisnis individu, firma, korporasi (perusahaan dan non-perusahaan), serta bisnis skala kecil dan besar, termasuk UMKM, semuanya dapat memperoleh manfaat dari penerapan teori entitas. UMKM lebih banyak berlaku sebagai organisasi individu mengakibatkan kurangnya kebutuhan pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan akuntansi. Tidak ada pemisahan antara keuangan pribadi dan bisnis dalam bentuk UMKM yang tetap beroperasi secara mandiri. Saat menjalankan bisnis, sudah seharusnya menjadi syarat untuk memisahkan keuangan. Hal ini sejalan dengan konsep entitas yang menyatakan bahwa UMKM dianggap terpisah dari pemiliknya dan merupakan entitas mandiri sehingga diperlukan pemisahan keuangan dan penyusunan laporan keuangan sebagai alat pertanggungjawaban.

B. Manfaat dan Tujuan SAK EMKM

SAK EMKM dimaksudkan agar semua unit usaha Menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Setiap perusahaan memiliki prinsip *going concern* yakni menginginkan usahanya terus berkembang. Untuk mengembangkan usaha perlu banyak Upaya yang harus dilakukan, salah satu Upaya itu adalah perlu menyakinkan public bahwa usaha yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam akuntansi wujud pertanggungjawaban tersebut dilakukan dengan Menyusun dan menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar, akan membantu manajemen perusahaan untuk memperoleh berbagai kemudahan, misalnya: untuk menentukan kebijakan perusahaan di masa yang akan datang dapat memperoleh pinjaman dana dari pihak ketiga, dan sebagainya.

SAK EMKM (2016), Standar EMKM ini disusun cukup sederhana sehingga Tindakan menyulitkan bagi penggunaanya yang merupakan perusahaan yang tergolong usaha kecil dan menengah. Sebagaimana kepanjangan yang telah diuraikan di atas merupakan unit kegiatan yang melakukan aktifitas tetapi sahamnya tidak dimiliki oleh masyarakat atau dengan kata lain unit usaha yang dimiliki oleh orang perorangan atau sekelompok orang, dimana kegiatan dan modalnya masih terbatas. Jenis kegiatan seperti ini di Indonesia menempati angka sekitar 80%. Oleh sebab itu perlu adanya perhatian khusus dari semua pihak yang berkepentingan dalam hal penyajian laporan keuangan.

C. Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM)

Berikut ini adalah definisi usaha mikro, kecil, dan menengah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 di Republik Indonesia :

- a. Usaha Mikro adalah usaha mandiri produktif yang dijalankan oleh orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memenuhi definisi usaha mikro menurut undang-undang.
- b. Usaha ekonomi produktif adalah usaha yang berdiri sendiri, dikuasai oleh orang atau badan usaha, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung merupakan bagian dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi ketentuan undang-undang. pengertian Usaha Kecil. aturan ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha. Bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari usaha yang lebih besar, tetapi baik langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang ini.

2. Klarifikasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

sesuai dengan peraturan pemerintah no. 7 Tahun 01 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), otoritas publik menjelaskan jenis usaha ditinjau dari permodalan usaha dan standar omzet sebagai berikut.:

1. Dengan modal usaha maksimal Rp, usaha mikro adalah usaha ekonomi yang menguntungkan yang dijalankan oleh perorangan atau keluarga. 1.000.000.000,- tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha tersebut berada dan dapat menghasilkan uang sampai dengan Rp. 2.000.000.000 per tahun
2. Usaha ekonomi kecil yang produktif dengan modal usaha sekitar Rp dikenal sebagai "usaha kecil". 1.000.000.000 – Rp. 5.000.000.000, tidak termasuk tempat usaha dan tanah, dan memperoleh penghasilan sekitar Rp. 2.000.000.000 – Rp. 15.000.000.000 per tahun
3. Usaha menengah dengan modal merupakan usaha yang berhasil secara ekonomi RP. 1.000.000.000 – Rp. 5.000.000.000 area pembatas dan bangunan untuk tempat usaha dan pengadaan sampai dengan Rp. 15.000.000.000–Rp. 50.000.000 setiap tahun.

Menurut klasifikasi berbeda yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan jumlah tenaga kerja, usaha mikro adalah usaha yang memiliki 1-4 tenaga kerja, usaha kecil memiliki 5-19 tenaga kerja, dan usaha menengah memiliki banyak tenaga kerja. karyawan. mencapai 20-99 individu.

Bank Dunia mengkategorikan UMKM, berbeda dengan BPS, berdasarkan tiga kriteria: kondisi karyawan, pendapatan, dan nilai aset:

- a. *Micro Enterprise*, adalah bisnis yang memiliki pekerja di bawah 30 orang, dengan gaji tahunan dan sumber daya sekitar USD 3 juta.
- b. *Small Enterprise* adalah bisnis dengan kurang dari 100 karyawan, pendapatan tahunan tidak lebih dari satu juta dolar, dan total aset tidak lebih dari satu juta dolar.
- c. *Medium Enterprise*, adalah bisnis yang memiliki batas 300 pekerja, dengan gaji tahunan hingga USD 15 juta, dan sumber daya total hingga USD 15 juta

D. Penyajian Laporan Keuangan Berstandar SAK EMKM

1. Pengertian Laporan Keuangan

Dalam PSAK paragraf 10, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menyatakan bahwa laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja organisasi. Aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan pengeluaran organisasi semuanya termasuk dalam penyajian laporan keuangan. Arus kas, kontribusi, dan keuntungan dan kerugian juga disertakan. Laporan fiskal lengkap mengingat proklamasi perubahan nilai, penjelasan pembayaran, catatan moneter, artikulasi pendapatan, dan catatan ringkasan anggaran. Jadwal dan informasi tambahan terkait laporan keuangan yang disajikan merupakan contoh catatan atas laporan keuangan. Catatan ini juga dapat mengungkapkan

pengaruh perubahan harga dan informasi tentang segmen industri keuangan dan geografis.

2. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang kinerja dan kondisi keuangan suatu organisasi yang berguna bagi sejumlah pihak luar dan dapat digunakan sebagai acuan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Paria ini termasuk pemasok aset untuk substansi, seperti bos pinjaman dan pendukung keuangan. Laporan keuangan juga menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen untuk mencapai tujuan (*stewardship*) atau tanggung jawabnya atas sumber daya yang telah diberikan.

3. Standar Akuntansi Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)

Norma Pembukuan entitas mikro Kecil,dan Sedang (SAK EMKM) yang disahkan pada tahun 2016 diharapkan untuk unsur-unsur yang tidak bertanggung jawab kepada publik sebagaimana dicirikan dalam Prinsip-prinsip Pembukuan Moneter untuk Zat yang Tidak Bertanggung Jawab kepada Masyarakat (SAK ETAP) memenuhi standar dan makna usaha kecil dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan dan pedoman yang berlaku di Indonesia. Entitas tanpa akuntabilitas publik adalah entitas yang:

1. Tidak memiliki akuntabilitas public signifikan.
2. Mendistribusikan laporan keuangan tujuan umum kepada pengguna dari luar. Pemilik yang tidak terlibat langsung dalam mengelola bisnis dan kreditur adalah contoh pengguna eksternal.Substansi memiliki tanggung jawab publik yang sangat besar, jika:
 - a. Untuk tujuan penerbitan sekuritas di pasar modal, entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran kepada otoritas pasar modal atau regulator lainnya atau sedang mempersiapkan untuk melakukannya;
 - b. Bank, perusahaan asuransi, pedagang efek, dana pensiun, reksadana, dan bank investasi adalah contoh entitas yang memegang aset untuk sekelompok besar orang sebagai fidusia..

Hanya jika otoritas mengizinkan mereka untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM, entitas yang tidak memenuhi definisi kriteria di atas dapat menggunakan SAK EMKM. Suatu entitas harus dapat membedakan kekayaan pribadi pemiliknya dengan kekayaan dan hasil usahanya, serta antara suatu usaha/badan dengan usaha/badan lain, agar dapat menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM. SAK EMKM secara tegas menjabarkan konsep badan usaha sebagai salah satu asumsi dasarnya.

Penerapan SAK EMKM yang optimal diharapkan dapat mendukung pertumbuhan UMKM di Indonesia. SAK EMKM menggunakan catatan dengan mengacu pada biaya masa lalu dan menyajikan tiga laporan keuangan: laporan keuangan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan yang memberikan rincian tambahan tentang operasi bisnis perusahaan. Penerbitan SAK EMKM ini diharapkan dapat mempermudah pelaku UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas dan sesuai standar yang dapat digunakan sebagai pedoman pengambilan keputusan yang lebih baik.

4. Kegunaan Laporan Keuangan

Kegunaan penyajian laporan keuangan dalam suatu bisnis antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Penyajian laporan keuangan dapat dijadikan acuan oleh pemilik usaha untuk mengetahui masa depan perusahaan, mengambil keputusan tentang kelangsungan usaha, dan

membuat penilaian.

- b. Untuk pendukung keuangan, laporan moneter digunakan untuk mensurvei pameran substansi bisnis. Selain itu, ini digunakan sebagai referensi saat memutuskan apakah akan tetap berinvestasi di perusahaan atau tidak.
- c. Setelah pinjaman diberikan, laporan keuangan dapat digunakan sebagai kontrol untuk memantau perkembangan usaha dan sebagai acuan dalam mengambil keputusan tentang kesinambungan pinjaman atau penarikan pinjaman bagi kreditur.
- d. Laporan keuangan dibutuhkan oleh calon kreditur sebagai informasi yang dapat menggambarkan kondisi keuangan usaha sehingga debitur dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pemberian pinjaman.
- e. Laporan keuangan perusahaan diperlukan oleh pemerintah untuk mendukung perhitungan dan pelaporan pajak perusahaan. karena tersedianya laporan keuangan yang memudahkan fiskus untuk memverifikasi keakuratan jumlah pajak yang dilaporkan.

E. Pengetahuan Akuntansi

1. Pengertian Pengetahuan Akuntansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah “pengetahuan” mencakup segala yang diketahui; kecerdasan, atau segala sesuatu yang kita tahu tentang subjek. Darwies A. Soelaiman menegaskan bahwa metode ilmiah dapat atau tidak dapat digunakan untuk memperoleh pengetahuan. Akibatnya, pengalaman dan informasi dari orang lain dapat memberikan pengetahuan. *The American Institute of Certified Public Accountants' Committee on Terminology* mendefinisikan akuntansi sebagai seni mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi dan peristiwa keuangan secara efisien, serta interpretasi dan hasil dari proses ini, dalam satuan uang. Mencermati pengertian informasi dan pembukuan di atas, maka cenderung diduga bahwa informasi pembukuan adalah informasi tentang cara mencatat, mencirikan, dan memeriksa hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan keuangan suatu organisasi, yang diperoleh baik secara otodidak maupun secara ringan. keterlibatan dan data dari orang lain.

Kegunaan Pengetahuan Akuntansi

Pentingnya keahlian akuntansi dalam manajemen bisnis antara lain:

- a. sebagai pengawas untuk mengawasi pertumbuhan bisnis.
- b. sebagai pemahaman dasar tentang pencatatan dan penyusunan laporan keuangan.
- c. Memperbaiki perkiraan pajak bisnis.
- d. sebagai acuan kebijakan dan keputusan bisnis.

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode pendekatan penelitian dengan memanfaatkan data yang didapatkan dilapangan (*Field Research*) yang mengharuskan peneliti berangkat ke lapangan untuk mengadakan pengamatan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di usaha mikro kecil dan menengah pada usaha rumah makan putri solo, yang beralamat di Kecamatan Muaro Bulian Kabupaten Batanghari. dan penelitian dimulai dari bulan agustus dan September.

C. Jenis dan Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti dengan pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Data sekunder merupakan data yang berasal dari observasi peneliti mengenai catatan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang akan dijadikan Objek Penelitian.

D. Teknik Pengolahan Dan Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengolahan analisis data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Tata cara pengelolaan masih dilakukan oleh pemilik sendiri yaitu dalam hal pembelian stock bahan mentah, personalia dan laporan keuangan.

Pemilik usaha mengetahui bahwa pencatatan keuangan suatu usaha penting untuk dilakukan, dengan melakukan pencatatan keuangan dapat diketahui seberapa besar pemasukan dan pengeluaran sehingga nantinya dapat menghitung laba yang diperoleh dan dapat mengetahui bagaimana kinerja usahanya seperti yang dikatakan pada saat dilakukannya wawancara dengan Bapak Martius selaku pemilik dari usaha Rumah Makan Putri Solo.

Namun dalam kenyataan sistem informasi akuntansi yang dilakukan oleh pemilik usaha Rumah Makan Putri Solo masih sangat sederhana dan proses pencatatan yang dilakukan masih dengan cara manual. Dan jauh bedanya dari laporan keuangan yang di terapkan pada SAK EMKM dikarenakan tidak melakukan pencatatan laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM dan tidak memiliki satupun jenis laporan keuangan dalam laporan keuangan yang dibuatnya.

Alasan pemilik UMKM Rumah Makan Putri Solo melakukan pencatatan keuangan semata-mata hanya untuk menentukan besarnya pendapatan usahanya dan kemudian dari pendapatan tersebut beberapa yang akan disisihkan untuk produksi dan untuk membayar gaji para karyawan. Berdasarkan atas hasil pengamatan dan wawancara yang dilakukan dapat di simpulkan bahwa pengalaman Bapak Martius selama 22 tahun sebagai pengusaha telah membuat informan mengerti akan pentingnya melakukan pencatatan atas setiap transaksi usahanya. Keinginan yang dimiliki informan untuk mengembangkan usahanya, serta untuk mempermudah dalam penggajian telah memotivasi informan untuk selalu melakukan pencatatan. Pencatatan dilakukan dengan alasan untuk mengetahui peningkatan dan penurunan pendapatan yang terjadi pada usahanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Martius selaku Pemilik Rumah Makan Putri Solo dapat disimpulkan bahwa, Bapak Martius tidak menerapkan standar akuntansi dikarenakan dirasa pemilik rumah makan tidak harus melakukan pencatatan, penyusunan dan laporan keuangan dikarenakan rumah makan masih berskala kecil, selain itu juga rumah makan tersebut masih milik bapak martius pribadi. Pemilik tidak melakukan pencatatan yang jelas mengenai pemasukan dan pengeluaran keuangan, dan pemilik hanya mengandalkan ingatan mengenai nominal tersebut. Usaha rumah makan ini sendiri masih berbasis nasional dan belum menggunakan sistem vivo, livo karena usaha ini masih usaha keluarga jadi pencatatan laporan keuangannya masih dikelola secara tradisional, tingkat pendapatan juga tidak merata perbulannya atau pendapatan masyarakat berpengaruh pada pendapatan rumah makan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudara Riki selaku salah satu karyawan pada Rumah Makan Putri Solo bahwasanya rumah makan itu masih berskala kecil dan tidak membuat pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudari wulan selaku salah satu konsumen pada Rumah Makan Putri Solo yang saya wawancarai mengenai pelayanan dirumah makan itu sendiri dan beliau berpendapat jika rumah makan putri solo dari segi pelayanan cukup cepat dan memuaskan, pelayanan juga ramah, dan mengenai pencatatan bukti pembelian atau nota pembayaran rumah makan putri solo tidak menggunakannya jika pembelian dalam jumlah banyak.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat di ambil pada penelitian yang berjudul Analisis Penerapan SAK EMKM pada UMKM sektor pangan di kecamatan Muaro Bulian Kabupaten Batanghari (Study pada Rumah Makan Putri Solo) :

1. Pelaksanaan pencatatan keuangan yang dilakukan Usaha Mikro Kecil dan Menengah untuk menyusun laporan keuangannya pada Rumah Makan Putri Solo, mereka tidak melakukan pencatatan atau pembukuan mengenai keluar masuknya keuangan. Hal ini dikarenakan rumah makan tersebut masih berskala kecil.
2. UMKM Pada Rumah Makan Putri Solo tidak melakukan pencatatan laporan keuangannya sesuai dengan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (SAK EMKM). Menurut bapak Martius selaku pemilik rumah makan itu sendiri tidak memerlukan pencatatan karena rumah makan tersebut masih milik beliau pribadi sehingga tidak membutuhkan laporan sebagai bukti yang harus di tunjukan pada pihak lain.

DAFTAR REFERENSI

Sumber Buku

- Abdul Azis dan A. Herani Rusland, 2009, "*Peranan Bank Indonesia Di Dalam Mendukung Perkembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah*" (Jakarta: pusat pendidikan dan studi kebanksentralan)
- Afrizal "*Metode penelitian kualitatif*" Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2014
- Darwis A. Soelaiman, *Filsafat Ilmu Pengetahuan Perspektif Barat dan Islam*. Aceh: Bandar Publishing. 2019.
- Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI, *SAK Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta: IAI, 2018
- Ikatan Akuntansi Indonesia. "*Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah*". Jakarta: Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntansi Keuangan 2016
- Kusuma dan Lutfiany. *Persepsi UMKM dalam memahami SAK EMKM*
- Mardiasmo, *Perpajakan edisi revisi tahun 2018*, Yogyakarta: Andi, 2018.
- Meleong, Lexy J. *Metedologi Penelitian Kualitatif*". CV. PT Rosdakarya 2018.
- Soemarno S.R., *Akuntansi Suatu Pengantar*, Jakarta: Salemba Empat, 2014
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*,
- Suwardjono, *Teori Akuntansi: Perekayasa pelaporan keuangan, Edisi ketiga. BPFE, Yogyakarta,*
- Tulus T.H. Tambunan, *UMKM di Indonesia*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2009)

Sumber Jurnal dan Skripsi

- Hermi Sularsih, Ammar Sobir "*Penerapan Akuntansi SAK EMKM Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM Kecamatan Lowakwaru Kota Malang*" 2019.

**ANALISIS PENERAPAN SAK EMKM PADA UMKM SEKTOR PANGAN DI
KECAMATAN MUARO BULIAN KABUPATEN BATANGHARI (Studi Pada Rumah
Makan Putri Solo)**

- Maya Aulia : “Penerapan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Lowokwaru Kota Malang” 2018.
- Moudy Olyvia Uno, Lintje Kalanggi, Rudy J. Pusung. "Analisis Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah (SAK EMKM) Pada UMKM (Studi Kasus Pada Rumah Karawo di Kota Gorontalo)" 2019.
- Muhammad Ivannurfadilah, 2018, "Pemahaman dan Penyajian Sak Etap pada Home Industry Kripik Tempe Di Sentra Kripik Tempe Karangtengah Pradon Ngawi (Tahun 2015-2016).
- Muhammad Syawal "Penyusunan Laporan Dengan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) (Studi Pada toko okeh-oleh pak DJ)" 2021.
- Muheramtohad, S. (2017) Peran Lembaga Keuangan Syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid : Jurnal Ekonomi dan perbankan syariah*, 2017, Vol. 8 No. 1
- Nenenng gustiani : “factor-faktor yang mempengaruhi penerapan standar akuntansi keuangan entitas mikro kecil dan menengah (UMKM) (Studi Empiris pada umkm di kecamatan benai
- Nuril Badria dan Nur Diana, 2018, “*Persepsi Pelaku UMKM Dan Sosialisasi SAK EMKM Terhadap di berlakukannya laporan keuangan yang berbasis SAK EMKM 1 Januari 2018 (Studi kasus pelaku UMKM se-malang)*,” *Jurnal Ilmiah*
- Risky Aminatul Mutiah “Penerapan Penyusunan Laporan Keuangan Pada UMKM Berbasis SAK EMKM” 2019.
- Rizki Asrinda Handayani, “Analisis Penerapan SAK EMKM Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kab. Luwu Utara (Studi Kasus Farhan Cake’s)” 2018. Oleh-oleh Pak DJ" 2021

Sumber Internet

BPS Kabupaten Batanghari

Diskop UMKM Provinsi Jambi. 2022. Rencana Strategi. Jambi: Dinas koperasi dan UKM Provinsi Jambi (Sumber: bappeda.jambikota.go.id.)

<http://www.bps.go.id> per tanggal 29 Desember 2022 Pukul 09.03 WIB.

Muh awal Yanto : “Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi usaha mikro kecil dikotaparepare” <https://pareparekota.go.id/wp-content/uploads/2017/09/Renstra-Peridag-013-018.pdf> (per tanggal 19 agustus 2021)

Wikipedia Kabupaten Batanghari

Wikipedia kecamatan Muara Bulian

Sumber Langsung dari kantor Perindagkop

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jambi. 2022. Rekapitulasi Data UMKM Provinsi Jambi

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Batanghari

Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021

Undang-undang Nomer 20 Tahun 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008

Sumber Wawancara

Wawancara bersama pemilik rumah makan (Per tanggal 15 Agustus 2023)

Wawancara bersama karyawan (Per tanggal 15 Agustus 2023)

Wawancara bersama salah satu konsumen (Per tanggal 15 Agustus 2023)